

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya.

Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat. Pelestarian lingkungan hidup mempunyai konotasi bahwa lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan, hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal.¹

Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat

¹Ninie Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta 1992, hlm 1

pemakaian.²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah beberapa kali diamandemen, namun belum banyak kajian yang bersinggungan dengan permasalahan lingkungan hidup.

Padahal hasil dari perubahan tersebut sangat dinantikan karena memberikan harapan dan jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan di Indonesia. Norma yang merupakan kunci dari peraturan mengenai lingkungan terdapat pada pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Peraturan mengenai lingkungan hidup juga diatur dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Berdasarkan kedua Pasal di atas maka sudah jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktifitas perekonomian Nasional.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya

² P. Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rineka Cipta, 2002, hlm 1

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pembangunan merupakan usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara kita. Pembangunan menghasilkan manfaat terutama di bidang perekonomian. Di samping itu, pembangunan akan menyebabkan terjadinya perubahan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam.³Salah satu dampak negatif pembangunan yang paling menonjol adalah timbulnya berbagai masalah kerusakan lingkungan. Apapun kenyataannya pencemaran tidak bisa dicegah, tidak bisa dihilangkan dan akan terus terjadi, sebab manusia tidak dapat menghindar untuk tidak mencemari lingkungan.

Penataan hukum di bidang lingkungan hidup oleh para pelaku kegiatan dibidang lingkungan hidup mutlak diperlukan untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan. Hukum lingkungan adalah hukum fungsional karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pemanfaatan lingkungan secara tidak bertanggung jawab dan perusakan lingkungan. Di Indonesia penegakan hukum lingkungan juga melibatkan berbagai instansi Pemerintah seperti Polisi, Jaksa, Pemerintah Daerah.

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan Nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang

³Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm 103

tertentu mengenai pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah dan mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat.⁴ Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 bahwa untuk pengendalian lingkungan hidup diserahkan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan di daerah adalah dengan adanya Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup ini terdapat di Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pada dasarnya memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten yang sedang berkembang dan mulai dikenal oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Salah satu objek wisata yang mulai terkenal adalah Kawasan Wisata Bahari Mandeh. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan sebagai peringkat pertama pada kategori Surga Tersembunyi Terpopuler di Anugerah Pesona Indonesia (API) II.⁵

Kawasan Wisata Bahari Mandeh merupakan wilayah yang akan digencarkan pembangunan demi menunjang sektor pariwisata. Hal ini ditakutkan akan berdampak langsung dengan lingkungan yang ada di sekitar Kawasan Mandeh. Sejak UU Nomor 23 Tahun 1997 diundangkan pada September 1997 sampai dengan saat ini, penegakan hukum merupakan titik kelemahan dalam

⁴Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 81.

⁵Liputan6, *Kawasan Wisata Mandeh, Surga Tersembunyi Terpopuler*, Diakses pada 4 Mei Pukul 21.00 wib.

melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup.⁶ Salah satu contohnya adalah di Kawasan Wisata Bahari Mandeh ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun merdeka.com, kerusakan di Kawasan Wisata Bahari Mandeh sudah berlangsung lama. Sejumlah pihak membangun penginapan tanpa izin, merusak hutan bakau dan terumbu karang untuk pembangunan pelabuhan pribadi dan meratakan perbukitan. Tercatat skala kerusakan hutan bakau di area mandeh tak kurang dari 1,2 hektar. Pembangunan jalan di sekitar Kawasan ini juga mengakibatkan sedimentasi pada pantai yang terdapat di Kenagarian Carocok Anau dan Kenagarian Mandeh.

Berdasarkan catatan Bupati Pesisir Selatan, kerusakan terparah terjadi di Nagari Sungai Nyalo. Kasus perusakan ini telah membawa salah satu pejabat tinggi di kabupaten pesisir selatan ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 98 dan 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman kurungan penjara selama tiga tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 3 miliar⁷.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan berfungsi untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu wilayah yang menjadi kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan dalam pengelolaan lingkungan adalah di Kawasan Wisata Bahari Mandeh. Kawasan Wisata Bahari Mandeh merupakan Kawasan yang akan di rencanakan menjadi kawasan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan telah mendapatkan pengakuan oleh masyarakat luas⁸. Oleh sebab itu, Kawasan Wisata Bahari Mandeh akan ditingkatkan

⁶Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Rafika Aditama, 2011, hlm 16..

⁷Merdeka.com, Diakses pada 4 mei 2018 pukul 21.00 wib

⁸Republika, *Sumbar Target Kawasan Wisata Mandeh jadi KEK*, Padang, 24 Maret 2016

pembangunannya untuk mencapai kelayakan menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Maka peran Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan di Kawasan Wisata Bahari Mandeh agar pembangunan tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya ke dalam suatu penulisan skripsi dengan judul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESIR SELATAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN WISATA BAHARI MANDEH”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Penulis merumuskan masalah untuk dikaji secara rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan lingkungan di Kawasan Wisata Bahari Mandeh
2. Apa hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Wisata Bahari Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan lingkungan di Kawasan Wisata Bahari Mandeh.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengelolaan lingkungan di Kawasan Wisata bahari Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas kemampuan berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Agraria dan Sumberdaya Alam, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bidang pengelolaan lingkungan.

E. Metode penelitian

Untuk memperoleh data yang kongkrit sebagai bahan dalam penulisan proposal ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Sosiologis (Empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat adaptif artinya penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan tidak adanya hubungan antara gejala lain dengan masyarakat.¹⁰

3. Jenis dan Sumber data

Didalam melakukan penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah :¹¹

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan yaitu Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 50.

¹¹ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm, 113-114

Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan di kawasan wisata mandeh terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar RI 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
6. Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
7. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan uraian Tugas jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

b) Bahan Hukum Sekuder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer. Seperti pendapat

para ahli yang terdapat dalam literatur yang digunakan serta dokumen yang diperlukan.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan. Bagi yang terdapat dalam peraturan sebagaimana yang dikemukakan. Maupun istilah asing yang dipergunakan oleh para ahli. Bahan hukum tertier ini dapat berupa kamus umum baik kamus bahasa indonesia, bahasa inggris, dan bahasa belanda maupun kamus hukum.

Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan sumber data yaitu :

a) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden. Dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

b) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan kepustakaan ini diperoleh dari :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun. Juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya. Wawancara dilakukan pada dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisa. Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses editing yakni pengeditan terhadap data

yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, teori ahli termasuk pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat.

